TRILOGI ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH
Vol. 07, No. 02, Desember 2026, Hal. 138-158

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, RAPAT KOMITE AUDIT, DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN ESG

Monica Soesanto[1*], Viriany[2]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta Indonesia
monica.125230215@stu.untar.ac.id[1*] viriany@fe.untar.ac.id[2]

ABSTRAK

Informasi environmental, social, and governance (ESG) memberikan gambaran mengenai cara perusahaan mengungkapkan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan institusional, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Melalui metode purposive sampling, diperoleh 26 perusahaan dengan total 130 observasi perusahaan-tahun. Pengungkapan ESG diukur berdasarkan jumlah item Global Reporting Initiative (GRI) yang diungkapkan dibandingkan dengan 89 item acuan. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12, dan Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model estimasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ESG. Sementara itu, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berkaitan dengan keluasan pengungkapan ESG, sedangkan dua mekanisme lainnya belum menunjukkan hubungan signifikan dalam sampel penelitian.

Kata Kunci: ESG; Kepemilikan Institusional; Frekuensi Rapat Komite Audit; Ukuran Dewan Komisaris

ABSTRACT

This study examines the relationship between good corporate governance mechanisms and environmental, social, and governance (ESG) disclosure among Consumer Non-Cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2025. Specifically, it tests the effects of institutional ownership, audit committee meeting frequency, and board of commissioners size on ESG disclosure. The research adopts a quantitative approach and uses secondary data collected from companies' annual reports and sustainability reports. Using purposive sampling, the final sample consists of 26 companies, representing 130 firm-year observations. ESG disclosure is measured by comparing the number of Global Reporting Initiative (GRI) items disclosed by each company with a reference set of 89 items. The data are analyzed through panel data regression using EViews 12, with the Random Effect Model (REM) selected as the estimation model. The results indicate that institutional ownership and audit committee meeting frequency do not have statistically significant effects on ESG disclosure. In contrast, board of commissioners size has a positive and statistically significant effect. These findings suggest that board size is associated with broader ESG disclosure, while the other two governance mechanisms do not show significant relationships within the observed sample.

Keywords: ESG Disclosure; Institutional Ownership; Audit Committee Meeting Frequency; Board Of Commissioners Size

Histori artikel:
Diunggah: 24-10-2026
Direvieu: 28-10-2026
Diterima: 3-11-2026
Dipublikasikan: 13-11-2026

CC BY SA

* Penulis korespondensi ✉

PENDAHULUAN

Investasi tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan tata kelola. Informasi mengenai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam mengevaluasi tanggung jawab perusahaan, mengingat penerapan ESG dapat berkaitan dengan reputasi, kepercayaan investor, dan akses terhadap modal (Bursa Efek Indonesia, 2024). Pengungkapan ESG memberikan informasi mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat serta praktik tata kelola yang diterapkan. Oleh karena itu, kelengkapan informasi ESG menjadi aspek penting dalam mendukung transparansi dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan (Gillan et al., 2021; Fuadah et al., 2022).

Di Indonesia, penerapan ESG didukung oleh regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 2021). Meskipun demikian, adanya regulasi pelaporan belum secara otomatis menjamin keseragaman kesiapan perusahaan dalam menerapkan ESG maupun kelengkapan informasi yang diungkapkan. Survei Nasional ESG CRMS Indonesia (2019) menunjukkan bahwa hanya 15,8% organisasi di Indonesia yang memiliki pedoman khusus terkait kriteria ESG dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, survei Bursa Efek Indonesia bersama *Mandiri Institute* (2024) terhadap 150 perusahaan mengidentifikasi keterbatasan data kuantitatif, sumber daya manusia, dan tingginya biaya pengumpulan data ESG sebagai tantangan penerapan ESG (Hafiyyan, 2026). Di sisi lain, jumlah emiten yang menyampaikan informasi keberlanjutan meningkat dari 505 perusahaan pada 2022 menjadi 724 pada 2023 dan 917 pada 2024 (*Pratama Institute*, 2025). Peningkatan jumlah pelapor tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan keseragaman kelengkapan pengungkapan ESG. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor internal perusahaan yang dapat berkaitan dengan perbedaan tingkat pengungkapan ESG, meskipun perusahaan berada dalam kerangka regulasi pelaporan keberlanjutan.

Persoalan tersebut relevan untuk diteliti pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini mencakup perusahaan yang menyediakan barang dan jasa dengan kebutuhan relatif stabil bagi masyarakat (Bursa Efek Indonesia, 2021). Aktivitas perusahaan dalam sektor ini berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, kondisi tenaga kerja, keamanan produk, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Fenomena lingkungan, sosial, dan tata kelola pada sektor ini menunjukkan pentingnya transparansi perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Dari aspek lingkungan, audit merek yang dilakukan Institut Pertanian Bogor bersama *Break Free From Plastic* (2024) menemukan kemasan sachet dari sejumlah perusahaan barang konsumsi, termasuk Unilever, Mayora, dan grup Indofood, di lokasi pencemaran (Pulungan, 2026). Dari aspek sosial, temuan BPOM mengenai produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap keamanan dan kualitas produk (BPOM, 2026). Sementara itu, tindakan pengawasan regulator terhadap emiten menunjukkan bahwa aspek tata kelola dan kepatuhan juga menjadi perhatian dalam aktivitas perusahaan (Wibowo, 2026). Fenomena tersebut memperlihatkan relevansi pengungkapan ESG untuk membantu pemangku kepentingan menilai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, konsumen, dan pemegang saham.

Salah satu faktor yang berpotensi menjelaskan perbedaan pengungkapan ESG adalah mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG). Berdasarkan teori keagenan, pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan serta asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, teori pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya, tidak hanya pemegang saham (Freeman, 1984). Dalam konteks tersebut, pengungkapan ESG dapat menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas, sedangkan mekanisme GCG berpotensi mendukung pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan informasi yang disampaikan kepada publik.

Penelitian ini berfokus pada tiga mekanisme GCG, yaitu kepemilikan institusional, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris. Kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan terhadap manajemen karena investor institusional memiliki kepentingan ekonomi dalam perusahaan. Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas kegiatan komite dalam membahas pelaporan, pengendalian internal, dan kepatuhan. Adapun ukuran dewan komisaris berkaitan dengan jumlah anggota yang terlibat dalam fungsi pengawasan manajemen. Ketiga mekanisme tersebut memiliki karakteristik pengawasan yang berbeda sehingga pengaruhnya terhadap pengungkapan ESG perlu diuji secara empiris. Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol karena perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya dan tekanan pemangku kepentingan yang lebih besar untuk melaporkan informasi keberlanjutan (Roestanto dkk., 2022)

Bukti empiris mengenai hubungan mekanisme GCG dengan pengungkapan ESG masih menunjukkan hasil yang beragam. Putri dan Nugraha (2026), Chulim et al. (2025), serta Silvia dan Hadiyati (2026) menemukan pengaruh positif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ESG. Sebaliknya, Roestanto et al. (2022) tidak menemukan pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan Qasem et al. (2022) menunjukkan bahwa hubungan kepemilikan dengan pelaporan ESG dapat berbeda menurut jenis kepemilikannya. Pada variabel frekuensi rapat komite audit, Anggraini et al. (2025) menemukan pengaruh positif dan signifikan, sementara Lendengtariang dan Bimo (2022), Itan et al. (2025), serta Chulim et al. (2025) tidak menemukan pengaruh signifikan. Cahyani et al. (2024) bahkan melaporkan pengaruh negatif dan signifikan. Ketidakkonsistenan juga ditemukan pada ukuran dewan komisaris. Sari dan Fitriani (2024), Erin et al. (2022), serta Silvia dan Hadiyati (2026) menemukan pengaruh positif, sedangkan Itan et al. (2025) menemukan hubungan negatif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme GCG dalam mendorong pengungkapan ESG belum dapat disimpulkan secara seragam.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji. Pertama, hasil empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ESG masih belum konsisten. Kedua, penelitian terdahulu banyak menggunakan objek dan konteks yang berbeda, seperti sektor perbankan dan energi, sehingga bukti empiris pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* di Indonesia masih perlu dikembangkan. Ketiga, dalam konteks regulasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia, peningkatan jumlah emiten yang menyampaikan informasi keberlanjutan belum cukup untuk menjelaskan apakah mekanisme pengawasan internal perusahaan berkaitan dengan kelengkapan pengungkapan ESG. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada perbedaan sektor dan periode

pengamatan, tetapi juga menguji apakah tiga mekanisme GCG yang memiliki karakteristik berbeda berhubungan dengan tingkat pengungkapan ESG pada sektor yang relevan dengan isu lingkungan, sosial, dan konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kepemilikan institusional, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan ESG pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2025, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris bagi teori keagenan dan teori pemangku kepentingan dalam menjelaskan hubungan mekanisme pengawasan perusahaan dengan transparansi informasi ESG. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dalam mengevaluasi penerapan pelaporan keberlanjutan, terutama terkait perbedaan kelengkapan informasi yang disampaikan perusahaan meskipun telah berada dalam kerangka regulasi yang sama. Bagi investor, hasil penelitian diharapkan membantu memahami relevansi karakteristik tata kelola dalam menilai pengungkapan ESG perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperjelas apakah seluruh mekanisme GCG memiliki keterkaitan yang sama dengan pengungkapan ESG atau terdapat mekanisme tertentu yang lebih relevan dalam mendorong keterbukaan informasi.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen yang diberi kewenangan untuk mengelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan serta asimetri informasi karena manajemen memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi internal perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan diperlukan untuk membatasi perilaku oportunistis manajemen dan mengurangi biaya keagenan.

Dalam penelitian ini, *agency theory* menjadi dasar untuk menjelaskan peran kepemilikan institusional, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris dalam mengawasi tindakan manajemen. Investor institusional dapat memantau keputusan perusahaan sebagai pemegang saham, sedangkan rapat komite audit menyediakan sarana untuk mengevaluasi proses pelaporan dan pengendalian internal. Dewan komisaris juga berperan mengawasi kebijakan manajemen, termasuk penyampaian informasi nonkeuangan kepada publik. Efektivitas ketiga mekanisme tersebut bergantung pada kualitas pengawasan, tingkat keterlibatan, dan kemampuan masing-masing pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya (Jensen & Meckling, 1976; Fuadah et al., 2022).

Stakeholder Theory

Stakeholder theory menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada pemegang saham, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memengaruhi atau terdampak oleh kegiatan perusahaan, seperti pekerja, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat (Freeman, 1984). Kelompok-kelompok tersebut membutuhkan informasi yang relevan untuk menilai dampak kegiatan perusahaan serta tanggung jawabnya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Pengungkapan ESG menjadi salah satu sarana komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Kepemilikan institusional dapat mendorong perhatian terhadap tuntutan keberlanjutan, komite audit dapat mengawasi proses penyusunan informasi, dan dewan komisaris dapat mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perspektif ini menjelaskan relevansi mekanisme tata kelola dalam mendukung transparansi dan keluasan informasi ESG yang disampaikan perusahaan kepada publik (Freeman, 1984; Fuadah et al., 2022).

Pengungkapan ESG

Pengungkapan ESG merupakan penyampaian informasi perusahaan mengenai aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) kepada publik. Penelitian ini mengukur pengungkapan ESG berdasarkan jumlah item GRI yang dilaporkan perusahaan dibandingkan dengan 89 item acuan. Skor pengungkapan tersebut menunjukkan keluasan cakupan informasi yang dilaporkan, tetapi tidak secara langsung mencerminkan ketepatan informasi, kedalaman uraian, ataupun pencapaian kinerja ESG perusahaan (Gillan et al., 2021; GRI, 2021).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ESG

Kepemilikan institusional menunjukkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Berdasarkan *agency theory*, investor institusional dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen karena memiliki kepentingan terhadap keputusan dan hasil pengelolaan perusahaan. Pengawasan tersebut berpotensi mengurangi asimetri informasi melalui dorongan untuk menyampaikan informasi yang lebih transparan, termasuk mengenai kebijakan dan aktivitas ESG.

Karakteristik investor institusional dapat menentukan kuat atau lemahnya dorongan terhadap pengungkapan ESG. Investor yang berorientasi jangka panjang memiliki insentif untuk memperhatikan risiko keberlanjutan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan dalam jangka panjang. Perhatian terhadap risiko tersebut dapat mendorong investor meminta informasi ESG yang lebih memadai sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab perusahaan dan keberlanjutan kegiatan bisnisnya. Dyck et al. (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional berkaitan positif dengan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan berdasarkan bukti lintas negara. Wang et al. (2023) juga menekankan pentingnya karakteristik investor institusional dalam menjelaskan tingkat pengungkapan informasi ESG.

Perspektif *stakeholder theory* mendukung argumen tersebut karena investor institusional yang memperhatikan keberlanjutan dapat mendorong perusahaan memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Peningkatan kepemilikan institusional diperkirakan memperkuat dorongan pengawasan terhadap transparansi ESG, terutama ketika investor memiliki orientasi jangka panjang dan aktif dalam pemantauan perusahaan. Pengaruh positif tersebut tidak selalu muncul apabila kepemilikan institusional didominasi oleh investor dengan orientasi atau kepentingan yang berbeda.

Pengukuran kepemilikan institusional berdasarkan proporsi total saham institusi belum membedakan orientasi investasi dan tingkat keterlibatan masing-masing investor. Penelitian ini tetap mengajukan arah positif berdasarkan potensi fungsi pengawasan investor institusional, dengan mempertimbangkan bahwa efektivitas pengawasan dapat bervariasi menurut karakteristik investor.

H_1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG

Frekuensi rapat komite audit menunjukkan jumlah pertemuan komite audit selama satu tahun. Berdasarkan *agency theory*, rapat komite audit menjadi salah satu sarana untuk mengawasi proses pelaporan, pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan. Pertemuan yang lebih sering dapat memberikan kesempatan bagi anggota komite untuk membahas kelengkapan informasi, mengevaluasi masalah pelaporan, serta meminta penjelasan manajemen mengenai informasi yang disampaikan kepada publik. Pengawasan yang mencakup informasi keberlanjutan berpotensi membantu perusahaan menyusun pengungkapan ESG secara lebih terstruktur dan transparan.

Perspektif *stakeholder theory* menjelaskan pentingnya pengawasan tersebut karena informasi lingkungan dan sosial dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Rapat komite audit yang dilakukan secara memadai dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan mendorong manajemen menyajikan informasi yang lebih luas. Frekuensi rapat yang tinggi diperkirakan meningkatkan kesempatan bagi komite audit untuk meninjau proses pelaporan dan menindaklanjuti kekurangan informasi ESG.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak selalu menghasilkan pengungkapan yang lebih luas. Lendengtariang dan Bimo (2022) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Cahyani et al. (2024) menemukan pengaruh negatif frekuensi rapat terhadap kualitas pengungkapan ESG. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah pertemuan belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan karena substansi pembahasan, kompetensi anggota, dan tindak lanjut atas keputusan rapat juga menentukan hasilnya.

Anggraini et al. (2025) mengkaji hubungan frekuensi rapat komite audit dan nilai perusahaan dengan pengungkapan ESG sebagai variabel yang berperan dalam hubungan tersebut. Fokus penelitian itu tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa frekuensi rapat komite audit meningkatkan pengungkapan ESG tanpa memeriksa hasil pengujian hubungan antarvariabel secara spesifik. Penelitian ini menggunakan mekanisme pengawasan dalam *agency theory* dan kebutuhan transparansi dalam *stakeholder theory* sebagai dasar untuk memperkirakan adanya pengaruh positif frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan ESG.

H_2: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan ESG

Ukuran dewan komisaris menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Berdasarkan *agency theory*, dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan manajemen. Jumlah anggota yang lebih besar berpotensi memperluas kapasitas pengawasan melalui pembagian tanggung jawab dan peninjauan keputusan dari berbagai perspektif. Kapasitas tersebut relevan bagi pengungkapan ESG karena informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola mencakup beragam aktivitas perusahaan yang memerlukan perhatian dalam proses pengawasan.

Resource dependence theory memberikan penjelasan tambahan mengenai manfaat ukuran dewan melalui sumber daya yang dibawa oleh para anggotanya. Hillman dan Dalziel (2003) mengintegrasikan perspektif keagenan dan ketergantungan sumber daya dengan

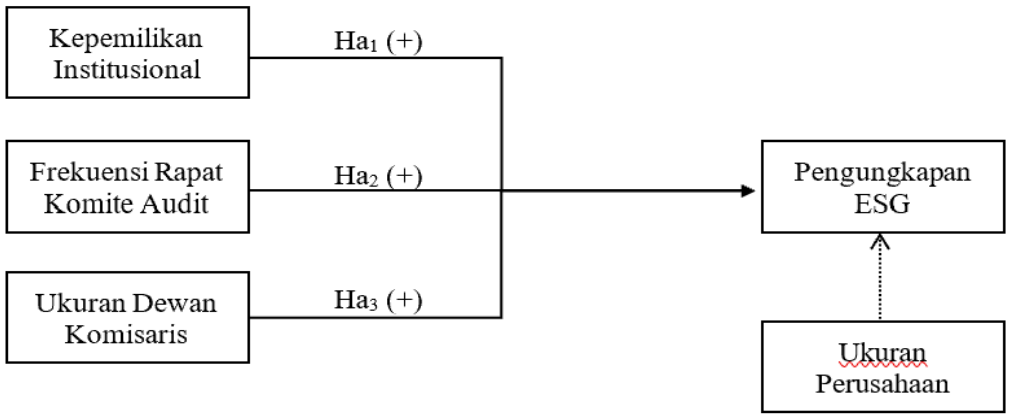
menjelaskan bahwa dewan memiliki fungsi pemantauan sekaligus penyediaan sumber daya. Anggota dewan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan jaringan yang mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Jumlah anggota yang lebih besar berpotensi menghadirkan variasi perspektif yang membantu perusahaan memahami isu ESG, menilai kebutuhan informasi, dan memperluas cakupan pengungkapan.

Perspektif *stakeholder theory* juga menjelaskan manfaat keberagaman perspektif dalam dewan komisaris. Informasi ESG berkaitan dengan kepentingan berbagai kelompok, termasuk pekerja, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan investor. Dewan yang memiliki sumber daya dan pengalaman lebih beragam berpotensi mempertimbangkan kebutuhan informasi kelompok-kelompok tersebut dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaporan perusahaan. Sari dan Fitriani (2024) menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ukuran dewan yang lebih besar juga dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Jensen (1993) menjelaskan bahwa dewan yang terlalu besar berpotensi menghadapi masalah efektivitas pengawasan dan koordinasi. Yermack (1996) menemukan hubungan negatif antara ukuran dewan dan nilai perusahaan, yang mendukung pandangan bahwa dewan berukuran lebih kecil dapat memiliki efektivitas yang lebih tinggi. Temuan Yermack berfokus pada nilai perusahaan, sehingga relevansinya dalam penelitian ini terbatas pada penjelasan mengenai potensi kelemahan koordinasi dan bukan sebagai bukti langsung pengaruh ukuran dewan terhadap pengungkapan ESG.

Manfaat tambahan sumber daya, pengalaman, dan perspektif diperkirakan lebih mendukung keluasan pengungkapan ESG apabila anggota dewan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Penelitian ini memilih arah positif karena kapasitas pengawasan dan sumber daya yang lebih besar diperkirakan dapat membantu perusahaan menyampaikan informasi ESG secara lebih luas. Potensi kendala koordinasi tetap menjadi pertimbangan yang dapat menjelaskan mengapa pengaruh ukuran dewan mungkin berbeda antarperusahaan.

H_3: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dan sumber data sekunder. Pengamatan mencakup perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2025. Data dikumpulkan dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan

indeks konten GRI yang dipublikasikan melalui situs BEI atau situs perusahaan. Sumber tersebut digunakan untuk menilai hubungan mekanisme GCG dengan pengungkapan ESG.

Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling* dari populasi perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. Kriteria yang diterapkan meliputi pencatatan secara berkelanjutan selama 2021–2025, tidak melakukan IPO selama rentang pengamatan, tidak mengalami *delisting*, tidak tercatat pada Papan Pemantauan Khusus selama periode tersebut, serta menyediakan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan beserta indeks GRI yang dapat diakses secara lengkap.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian mencakup 26 perusahaan untuk lima tahun pengamatan, sehingga jumlah data perusahaan-tahun yang dianalisis adalah 130 observasi.

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kriteria pemilihan sampel	2021	2022	2023	2024	2025
1	Populasi perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI	97	112	124	128	132
2	Perusahaan yang IPO pada 2021	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)
3	Perusahaan yang IPO pada 2022		(15)	(15)	(15)	(15)
4	Perusahaan yang IPO pada 2023			(12)	(12)	(12)
5	Perusahaan yang IPO pada 2024				(4)	(4)
6	Perusahaan yang IPO pada 2025					(4)
	Perusahaan yang terdaftar berturut-turut di BEI	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**
7	Perusahaan yang berada di Papan Pemantauan Khusus selama periode pengamatan					(13)
8	Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan/laporan keberlanjutan yang dapat diakses secara lengkap dan/atau tidak menyajikan indeks pengungkapan GRI Standards					(49)
	Sampel yang terambil (perusahaan per tahun)					**26**
	Total sampel selama periode penelitian 2021-2025 (26 × 5 tahun)					**130**

Berdasarkan proses seleksi, sebanyak 13 perusahaan dikeluarkan karena berada di Papan Pemantauan Khusus pada tahun 2025. Sebanyak 49 perusahaan unik juga dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria ketersediaan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan yang dapat diakses secara lengkap serta indeks pengungkapan GRI Standards selama periode penelitian. Kriteria ketersediaan laporan diterapkan untuk memastikan bahwa data yang diperlukan dalam pengukuran pengungkapan ESG dapat diperoleh secara konsisten.

Pengungkapan ESG ditetapkan sebagai variabel dependen. Variabel independen yang diuji terdiri dari kepemilikan institusional, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris. Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol karena perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dan menghadapi tekanan pemangku kepentingan yang lebih tinggi untuk melaporkan informasi keberlanjutan, sehingga dapat memengaruhi tingkat pengungkapan ESG terlepas dari mekanisme tata kelola. Rincian indikator serta formula pengukuran disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Pengukuran
Pengungkapan ESG	ESGD	Jumlah item GRI yang dilaporkan ÷ jumlah seluruh item GRI acuan x 100%
Kepemilikan institusional	KI	Saham institusi ÷ total saham beredar × 100%
Frekuensi rapat komite audit	FRKA	Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun
Ukuran dewan komisaris	UDK	Jumlah anggota dewan komisaris pada akhir tahun
Ukuran perusahaan (kontrol)	SIZE	Logaritma natural total aset pada akhir tahun

Sumber: Diolah berdasarkan definisi operasional dalam penelitian.

Keterangan:

ESG: skor 1 jika item GRI tercantum pada indeks konten GRI dalam laporan perusahaan dan 0 jika tidak. Item acuan berjumlah 89, disusun berdasarkan dokumen GRI Standards seri 200 (ekonomi), 300 (lingkungan), dan 400 (sosial) dengan edisi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Seluruh perusahaan dinilai dengan daftar item yang sama pada semua tahun pengamatan

KI: persentase saham yang dimiliki institusi lokal dan asing, termasuk pemegang saham 5% atau lebih, terhadap total saham beredar pada akhir tahun, berdasarkan tabel komposisi pemegang saham dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

FRKA dan UDK: berdasarkan laporan tahunan.

SIZE: variabel kontrol.

Data dianalisis dengan perangkat lunak EViews 12. Tahapan analisis mencakup statistik deskriptif, penentuan spesifikasi regresi data panel, pengujian asumsi yang dilaporkan, serta pengujian hipotesis. Uji *Chow, Hausman,* dan *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan sebagai dasar pemilihan model panel.

Signifikansi koefisien setiap variabel dinilai menggunakan uji t, sedangkan uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen secara bersama-sama. *Adjusted R-squared* digunakan untuk melihat proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan model dengan mempertimbangkan jumlah variabel prediktor.

Model regresi panel yang digunakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ESG_it = \alpha + \beta_1 KI_it + \beta_2 FRKA_it + \beta_3 UDK_it + \beta_4 SIZE_it + \varepsilon_it$$

Keterangan:

- ESGD = pengungkapan ESG perusahaan i pada tahun t
- α = konstanta
- β_1, β_2, β_3 = koefisien regresi masing-masing variabel independent
- KI = kepemilikan institusional

- FRKA = frekuensi rapat komite audit
- UDK = ukuran dewan komisaris
- SIZE = ukuran perusahaan
- ε = *error term*
- i = perusahaan
- t = waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan sebaran nilai dari 130 observasi yang dianalisis. Ringkasan untuk setiap variabel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	Pengungkapan ESG	Kepemilikan Institusional	Frekuensi Rapat Komite Audit	Ukuran Dewan Komisaris	Ukuran Perusahaan
Mean	45,43647	77,56484	6,607692	4,700000	15,93378
Maximum	83,14607	100,0000	43,00000	9,000000	19,19992
Minimum	7,865169	0,190000	3,000000	2,000000	13,44082
Std. Dev.	19,26514	28,71214	6,454968	1,967369	1,375892
Observations	130	130	130	130	130

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 12.

Skor pengungkapan ESG memiliki nilai rata-rata 45,43647, dengan rentang 7,865169 hingga 83,14607. Rentang tersebut memperlihatkan perbedaan cakupan item GRI yang dilaporkan antarperusahaan maupun antarperiode.

Proporsi kepemilikan institusional rata-rata tercatat 77,56484, dengan nilai minimum 0,1900 dan maksimum 100,0000. Untuk rapat komite audit, rata-ratanya 6,607692 kali per tahun; jumlah rapat pada observasi sampel berkisar dari tiga sampai 43 kali.

Jumlah anggota dewan komisaris rata-rata adalah 4,7000 orang, dengan nilai terendah dua dan tertinggi sembilan orang. Standar deviasi 1,967369 menunjukkan adanya variasi jumlah komisaris di antara perusahaan sampel. Statistik ini menjadi gambaran awal sebelum pengujian hubungan antarvariabel dilakukan.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tiga pengujian digunakan untuk memilih model regresi panel. Uji *Chow* memberikan probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0000, yang mendukung *fixed effect* dibandingkan *common effect*. Pada uji *Hausman*, probabilitas 0,2138 berada di atas batas 0,05 sehingga *random effect* dipilih dibandingkan *fixed effect*. Uji LM menghasilkan probabilitas *cross-section* Breusch–Pagan sebesar 0,0000, yang juga mendukung *random effect* dibandingkan *common effect.* Jika ketiga hasil pemilihan model dipertimbangkan bersama, spesifikasi yang digunakan untuk pengujian selanjutnya adalah *Random Effect Model* (REM).

Pengujian Asumsi dan Kelayakan Model

Probabilitas Jarque–Bera pada pengujian normalitas sebesar 0,146829, lebih besar dari 0,05. Melalui uji multikolinearitas didapatkan nilai korelasi antarvariabel independen adalah 0,123734 untuk kepemilikan institusional dengan frekuensi rapat komite audit; 0,070833 untuk kepemilikan institusional dengan ukuran dewan; −0,148516 untuk frekuensi rapat dengan ukuran dewan komisaris; 0,308173 untuk kepemilikan institusional dengan ukuran perusahaan; 0,276713 untuk frekuensi rapat komite audit dengan ukuran perusahaan; dan 0,396601 untuk ukuran dewan dengan ukuran perusahaan. Berdasarkan korelasi berpasangan tersebut, tidak terlihat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen.

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, didapatkan nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,3826; nilai probabilitas frekuensi rapat komite audit sebesar 0,3476; nilai probabilitas ukuran dewan sebesar 0,0621; dan nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar 0,5597. Nilai probabilitas lebih tinggi daripada 0,05 maka variabel terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,109394. Nilai tersebut berada di antara -2 dan +2 , sehingga berdasarkan kriteria Santoso (2018) yang digunakan, dimana :

- Angka D-W di bawah -2 menunjukkan adanya autokorelasi positif.
- Angka D-W yang berada di rentang -2 hingga +2 mengindikasikan ketiadaan autokorelasi.
- Angka D-W di atas +2 menandakan adanya autokorelasi positif.

model regresi dinyatakan tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, model regresi dinilai tidak menunjukkan adanya masalah autokorelasi berdasarkan kriteria tersebut.

Hasil Regresi Data Panel

Koefisien hasil estimasi REM digunakan untuk mengevaluasi hubungan setiap mekanisme GCG dengan pengungkapan ESG. Tabel 4 merangkum koefisien, statistik t, nilai probabilitas, serta keputusan pengujian untuk masing-masing variabel.

Tabel 4. Hasil Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-statistic	Probabilitas	Keputusan
Konstanta	-51,92415	-1,598274	0,1125	—
Kepemilikan institusional	-0,033794	-0,365733	0,7152	Tidak signifikan
Frekuensi rapat komite audit	−0,363170	−0,936094	0,3510	Tidak signifikan
Ukuran dewan komisaris	3,204223	2,863029	0,0049	Positif dan signifikan
Ukuran perusahaan	5,480288	2,424974	0,0167	—

Statistik Model	Nilai
R-squared	0,156541
Adjusted R-squared	0,129551
F-statistic	5,799828
Prob(F-statistic)	0,000258
Jumlah Observasi	130

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan EViews 12

Estimasi untuk kepemilikan institusional menghasilkan koefisien -0,033794 dan probabilitas 0,7152, sehingga pengaruhnya tidak signifikan pada taraf 5%. Frekuensi rapat komite audit memiliki koefisien −0,363170 dengan probabilitas 0,3510 dan juga tidak signifikan. Sebaliknya, koefisien ukuran dewan komisaris sebesar 3,204223 dengan probabilitas 0,0049 menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan pengungkapan ESG.

Uji simultan menghasilkan *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000258, lebih rendah dari 0,05. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara bersama-sama signifikan dalam model. *Adjusted R-squared* sebesar 0,129551 berarti model menjelaskan sekitar 12,96% variasi pengungkapan ESG setelah memperhitungkan jumlah prediktor; bagian variasi lainnya tidak dijelaskan oleh variabel yang dimasukkan dalam model.

Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ESG

Hipotesis pertama (H_1) tidak didukung. Koefisien kepemilikan institusional negatif (-0,033794) dan tidak signifikan (p = 0,7152).

Melalui *agency theory*, pemegang saham institusional dipandang sebagai pengawas yang menekan manajemen agar pelaporan, termasuk ESG, lebih transparan (Cepêda dkk., 2025). Namun, efektivitas pengawasan itu bergantung pada horizon investasi. Investor jangka panjang mengawasi secara berkelanjutan, sedangkan investor jangka pendek cenderung pasif dan menoleransi pengungkapan yang dangkal. Penelitian ini mengukur kepemilikan institusional sebagai proporsi saham tanpa membedakan jenis dan horizon investasinya, sehingga pengaruh investor yang mendorong dan yang tidak mendorong pengungkapan ESG saling meniadakan.

Rata-rata kepemilikan institusional dalam sampel sangat tinggi, yaitu 77,56% (median 89,24%), sehingga variasi antarperusahaan kecil. Selain itu, emiten sudah diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan melalui POJK Nomor 51/POJK.03/2017, dan sampel hanya memuat perusahaan yang menyajikan indeks GRI. Kondisi ini membuat perbedaan pengungkapan ESG antarperusahaan menjadi sempit.

Dari sisi *stakeholder theory*, investor institusional memprioritaskan pemangku kepentingan menurut kekuasaan, legitimasi, dan urgensinya, dan bagi investor jangka pendek pengungkapan ESG dipandang sebagai biaya (Aluchna dkk., 2022). Dyck dkk. (2019) juga menyebut bahwa investor institusional lebih sering memengaruhi perusahaan lewat keterlibatan privat daripada tekanan publik, sehingga pengaruhnya tidak selalu tampak pada pengungkapan yang dipublikasikan.

Wang dkk. (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional secara umum meningkatkan pengungkapan ESG. Namun, pada industri berpolusi tinggi, termasuk makanan dan minuman, hubungannya tidak signifikan. Menurut mereka, industri tersebut sudah mendapat tekanan sosial dan regulator yang besar, sehingga pengungkapannya relatif tinggi dan peran investor menjadi lemah. Karakteristik serupa melekat pada sebagian perusahaan *consumer non-cyclicals* dalam sampel ini.

Hasil ini sejalan dengan Aluchna dkk. (2022), Qasem dkk. (2022), dan Zairin dkk. (2025) yang tidak menemukan hubungan positif signifikan. Sebaliknya, Chulim dkk. (2025), Silvia dan Hadiyati (2026), serta Wardani dkk. (2025) menemukan hubungan positif, dan Adani dan Marsono (2026) menemukan hubungan negatif signifikan. Perbedaan ini berkaitan dengan

sektor. Perbankan sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga pengungkapan keberlanjutan menjadi bagian dari reputasi dan investor memiliki alasan untuk mendorongnya (Silvia & Hadiyati, 2026). Pada sektor *consumer non-cyclicals*, tekanan regulator dan masyarakat yang sudah ada membuat peran investor lebih lemah, sejalan dengan temuan Wang dkk. (2023).

Hubungan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG

Hipotesis kedua (H_2) tidak didukung. Koefisien frekuensi rapat komite audit negatif (−0,363170) dan tidak signifikan (p = 0,3510). Tambahan satu rapat per tahun berhubungan dengan penurunan skor ESG sekitar 0,36 poin persen, tetapi besaran ini tidak dapat dibedakan dari nol.

Melalui *agency theory*, rapat merupakan sarana utama komite audit dalam membantu dewan komisaris mengawasi pelaporan (Anggraini dkk., 2025; Chulim dkk., 2025). Namun, frekuensi rapat tidak menggambarkan kualitasnya. Rapat yang lebih sering tidak menjamin pengawasan yang lebih dalam jika tidak menghasilkan keputusan yang ditindaklanjuti (Lendengtariang & Bimo, 2022). Frekuensi dalam penelitian ini hanya dihitung dari jumlah rapat karena sebagian besar perusahaan tidak mengungkapkan agenda rapat, sehingga tidak diketahui apakah isu ESG dibahas (Cahyani dkk., 2024).

Rata-rata rapat dalam sampel 6,61 kali per tahun (median 5), di atas batas minimum empat kali (OJK, 2015), dengan standar deviasi 6,45 dan nilai maksimum 43 rapat. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah rapat antarperusahaan sangat beragam, tetapi jumlah yang lebih banyak tidak berarti pengawasan terhadap pelaporan ESG lebih intens. Rapat yang melebihi ketentuan minimum dapat sekadar memenuhi kewajiban (Cahyani dkk., 2024). Peran komite audit juga masih berfokus pada laporan keuangan dan pengendalian internal (Immanuel & Sambuaga, 2024), sedangkan kewenangan akhir atas pengungkapan berada pada direksi (Giannarakis dkk., 2020).

Hasil ini sejalan dengan Lendengtariang dan Bimo (2022) serta Chulim dkk. (2025), yang tidak menemukan hubungan signifikan antara karakteristik komite audit dan pengungkapan keberlanjutan, dan arah negatifnya sama dengan Cahyani dkk. (2024). Sebaliknya, Anggraini dkk. (2025) pada sektor energi dan Immanuel dan Sambuaga (2024) pada perusahaan nonkeuangan menemukan hubungan positif, dengan periode penelitian 2020–2022 yang berbeda dari penelitian ini (2021–2025). Cepêda dkk. (2025) mencatat bahwa mekanisme tata kelola lebih efektif pada sektor yang sensitif terhadap isu ESG, seperti pertambangan serta minyak dan gas. Rakhmayani dkk. (2026) juga menemukan hubungan positif, tetapi mencatat bahwa frekuensi rapat pada penelitian mereka hanya diukur secara kuantitatif tanpa informasi isi pembahasan. Catatan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yaitu jumlah rapat saja tidak cukup untuk menjelaskan pengungkapan ESG.

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan ESG

Hipotesis ketiga (H_3) didukung. Koefisien ukuran dewan komisaris 3,204223 dengan p = 0,0049. Ketika variabel lain dianggap tetap, tambahan satu anggota dewan komisaris berhubungan dengan kenaikan skor pengungkapan ESG sekitar 3,2 poin persen, atau sekitar 3 dari 89 item GRI. Hubungan ini tetap signifikan setelah ukuran perusahaan dikendalikan.

Temuan ini dijelaskan oleh *agency theory*, yang memandang dewan komisaris sebagai mekanisme pengawasan yang mewakili pemegang saham terhadap manajemen (Itan dkk., 2025). Literatur memuat dua pandangan: dewan yang lebih besar dinilai lebih efektif karena

sulit dipengaruhi manajemen, sementara pandangan lain menilainya kurang efisien dibandingkan dewan kecil (Erin dkk., 2022). Hasil ini mendukung pandangan pertama. Dewan yang lebih besar memiliki jaringan luas, pengalaman beragam, dan beban kerja yang lebih terbagi (Sari & Fitriani, 2024), serta lebih mampu memastikan direksi mematuhi pedoman pelaporan keberlanjutan dan memberi nasihat tentang topik yang perlu diungkapkan (Immanuel & Sambuaga, 2024). Dari sisi stakeholder theory, dewan yang lebih besar menyediakan keragaman latar belakang dan keahlian yang mendukung aktivitas ESG (Zaid dkk., 2020).

Hasil ini sejalan dengan Sari dan Fitriani (2024), Silvia dan Hadiyati (2026), Immanuel dan Sambuaga (2024), Erin dkk. (2022), serta Rinaldy dan Inawati (2026) pada perusahaan lintas sektor di BEI tahun 2022–2023. Sebaliknya, Itan dkk. (2025) dan Adani dan Marsono (2026) menemukan hubungan negatif. Keduanya menjelaskan bahwa dewan yang terlalu besar menimbulkan biaya koordinasi dan menyebarnya tanggung jawab antaranggota. Pada sampel ini, dewan komisaris rata-rata hanya beranggotakan 4,70 orang (kisaran 2 sampai 9), sehingga penambahan anggota masih memperbesar kapasitas pengawasan dan belum sampai pada ukuran yang menimbulkan masalah koordinasi tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji hubungan kepemilikan institusional, frekuensi rapat komite audit, dan ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan ESG pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* di Bursa Efek Indonesia selama 2021-2025, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Berdasarkan estimasi *Random Effect Model*, kepemilikan institusional dan frekuensi rapat komite audit tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan ESG, sehingga hipotesis pertama dan kedua tidak didukung. Ukuran dewan komisaris berhubungan positif dan signifikan, sehingga hipotesis ketiga didukung. Setiap tambahan satu anggota dewan komisaris berhubungan dengan kenaikan skor pengungkapan ESG sekitar 3,2 poin persen. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga berhubungan positif dan signifikan. Model signifikan secara simultan, tetapi daya jelasnya masih terbatas

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, *adjusted* R^2 sebesar 12,96% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pengungkapan ESG dijelaskan oleh faktor di luar model. Kedua, penelitian tidak mengendalikan endogenitas, sehingga temuan hanya menunjukkan hubungan statistik, bukan hubungan sebab-akibat. Ketiga, sampel hanya 26 perusahaan dan hanya memuat perusahaan yang menyajikan indeks GRI, sehingga ada potensi bias seleksi dan generalisasi hasil terbatas. Keempat, kepemilikan institusional diukur sebagai proporsi agregat tanpa membedakan jenis dan horizon investor, frekuensi rapat hanya menghitung jumlah tanpa isi pembahasan, dan indeks GRI hanya mengukur jumlah item yang dilaporkan, bukan ketepatan, kedalaman, atau dampak informasi ESG.

DAFTAR PUSTAKA

Adani, N. H., & Marsono, M. (2026). Board governance attributes and ESG disclosure: Evidence from non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Jurnal Akuntansi dan Auditing, 22(3), 52–68. https://doi.org/10.14710/jaa.22.3.52-68

Aluchna, M., Roszkowska-Menkes, M., Kamiński, B., & Bosek-Rak, D. (2022). Do institutional investors encourage firm to social disclosure? The stakeholder salience perspective. Journal of Business Research, 142, 674–682. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.064

Anggraini, F., Helmi, S., & Meihendri. (2025). Frequency of audit committee meetings and firm value: Environmental, social, and governance disclosure (ESG) roles. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 15(2), 381–395. https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.30189

BPOM. (2026). BPOM temukan 56 ribu produk pangan tidak memenuhi ketentuan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 2026. https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-temukan-56-ribu-produk-pangan-tidak-memenuhi-ketentuan-selama-ramadan-dan-jelang-idulfitri-2026

Bursa Efek Indonesia. (2021). BEI implementasikan IDX Industrial Classification. https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/1456

Bursa Efek Indonesia. (2024). ESG, kunci investasi berkelanjutan di pasar modal. https://www2.idx.co.id/id/berita/artikel/?id=8c16e649-29bd-ef11-b809-85a72685ebb3

Cahyani, N. M. A., Redita, K., & Rinaningsih, R. (2024). The role of audit committee attributes in enhancing of environmental, social, and governance disclosure standards. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 5(2), 338–353. https://doi.org/10.31258/current.5.2.338-353

Cepêda, C., Monteiro, A. P., & Aibar-Guzmán, B. (2025). Bridging the ESG credibility gap: The role of institutional investors in mitigating ESG decoupling. Business Strategy and the Environment, 34(6), 7139–7160. https://doi.org/10.1002/bse.4336

Chulim, F. R., Nurullah, A., & Patmawati, P. (2025). The influence of the audit committee characteristics and institutional ownership on sustainability report disclosure. Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 15(2), 216–227. https://doi.org/10.26714/mki.15.2.2025.216-227

CRMS. (2019). Laporan ESG survey 2019: Kondisi praktis penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia.

Dyck, A., Lins, K. V., Roth, L., & Wagner, H. F. (2019). Do institutional investors drive corporate social responsibility? International evidence. Journal of Financial Economics, 131(3), 693–714. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.08.013

Erin, O., Adegboye, A., & Bamigboye, O. A. (2022). Corporate governance and sustainability reporting quality: Evidence from Nigeria. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 13(3), 680–707. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-06-2020-0185

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press.

Fuadah, L. L., Mukhtaruddin, M., Andriana, I., & Arisman, A. (2022). The ownership structure, and the environmental, social, and governance (ESG) disclosure, firm value and firm performance: The audit committee as moderating variable. Economies, 10(12), 314. https://doi.org/10.3390/economies10120314

Giannarakis, G., Andronikidis, A., & Sariannidis, N. (2020). Determinants of environmental disclosure: Investigating new and conventional corporate governance characteristics. Annals of Operations Research, 294(1–2), 87–105. https://doi.org/10.1007/s10479-019-03323-x

Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 66, 101889. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889

Hafiyyan. (2026). BEI: Indeks ESG makin jadi panduan investasi. Bisnis.com. https://market.bisnis.com/read/20260407/7/1964884/bei-indeks-esg-makin-jadi-panduan-investasi

Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of directors and firm performance: Integrating agency and resource dependence perspectives. Academy of Management Review, 28(3), 383–396. https://doi.org/10.5465/AMR.2003.10196729

Immanuel, G., & Sambuaga, E. A. (2024). The influence of corporate governance elements on the disclosure of sustainability reporting. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 22(2), 287–302. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v22i2.23754

Itan, I., Hilrian, R. D., & Ramadana, M. (2025). The role of board composition on ESG disclosure: An analytical study in Indonesia. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 9(4), 3312–3334. https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2817

Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. The Journal of Finance, 48(3), 831–880. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Lendengtariang, Y., & Bimo, I. D. (2022). Peran komite audit pada sustainability disclosure. Journal of Business & Banking, 12(1), 97–108. https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3199

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/129651/peraturan-ojk-no-51pojk032017-tahun-2017

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx

Pratama Institute. (2025). Tren implementasi laporan keberlanjutan di Indonesia. https://institute.pratamaindomitra.co.id/tren-implementasi-laporan-keberlanjutan

Pulungan, A. M. (2026). IPB ingatkan laut RI darurat sampah plastik, brand emiten ini paling banyak ditemukan. Kabar Bursa. https://www.kabarbursa.com/ekonomi-hijau/ipb-ingatkan-laut-ri-darurat-sampah-plastik-brand-emiten-ini-paling-banyak-ditemukan

Putri, Y. A., & Nugraha, A. P. (2026). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ESG dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 11(1), 1–13.

Qasem, A., Al-Duais, S. D., Wan-Hussin, W. N., Bamahros, H. M., Alquhaif, A., & Thomran, M. (2022). Institutional ownership types and ESG reporting: The case of Saudi listed firms. Sustainability, 14(18), 11316. https://doi.org/10.3390/su141811316

Rakhmayani, A., Prasetyo, R. A., Aresteria, M., Wardhani, D. K., & Syaputera, M. A. (2026). Audit committee size, independence, and meeting frequency: Do they affect ESG performance? International Conference on Vocational Business, Logistic, Accounting, Supply Chain, Tax (ICoBLAST), 1(1), 118–129.

Rinaldy, R. A., & Inawati, W. A. (2026). Pengaruh board size, board gender diversity, board meetings, dan independent commissioners terhadap environmental, social, and

governance (ESG) disclosure pada perusahaan seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2023. Journal of Indonesia Business Research (JIBR), 4(1). https://doi.org/10.25124/JIBR.V4I1.10866

Roestanto, A., Vivianita, A., & Nurkomalasari, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, jenis industri, dan struktur kepemilikan terhadap environmental, social, and governance (ESG) disclosure (Studi empiris perusahaan di Indonesia yang terdaftar di IDX 2017–2020). Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 8(1), 1. https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i1.958

Santoso, S. (2017). Menguasai statistik dengan SPSS 24. Elex Media Komputindo

Sari, T. K., & Fitriani, N. (2024). How do board characteristics influence the ESG disclosure in Indonesia? Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 27(2), 208–215. https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss2.art9

Silvia, A., & Hadiyati, S. N. (2026). Determinants of environmental, social, and governance (ESG) disclosure in Indonesian banking sector. Journal of Contemporary Accounting, 8(1), 126–140. https://doi.org/10.20885/jca.vol8.iss1.art9

Wang, J., Ke, Y., Zhang, H., & Cheng, Y. (2023). Which institutional investors can improve the level of corporate ESG information disclosure? PLOS ONE, 18(11), e0290008. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290008

Wardani, I. A., Juanda, A., & Wicaksono, A. P. N. (2025). Structural ownership and ESG disclosure: Unveiling their impact on corporate financial performance. Journal of Accounting and Investment, 26(1), 314–334. https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.24193

Wibowo, R. (2026). OJK beberkan pelanggaran emiten sepanjang 2026: Kasus ROTI hingga transaksi material BNBR. IDX Channel. https://www.idxchannel.com/market-news/ojk-beberkan-pelanggaran-emiten-sepanjang-2026-kasus-roti-hingga-transaksi-material-bnbr

Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. Journal of Financial Economics, 40(2), 185–211. https://doi.org/10.1016/0304-405X(95)00844-5

Zaid, M. A. A., Abuhijleh, S. T. F., & Pucheta-Martínez, M. C. (2020). Ownership structure, stakeholder engagement, and corporate social responsibility policies: The moderating effect of board independence. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(3), 1344–1360. https://doi.org/10.1002/csr.1888

Zairin, G. M., Lim, T. S., Khairunnisa, H., Respati, D. K., Musyaffi, A. M., Nurmalita, S., & Hoo, W. C. (2025). The limited influence of institutional ownership on environmental, social, governance, and financial outcomes. Corporate Governance and Sustainability Review, 9(3, special issue), 242. https://doi.org/10.22495/cgsrv9i3sip5

Lampiran A

No	Kode GRI	Standar	Deskripsi Item
1	**201-1**	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
2	**201-2**	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat perubahan iklim
3	**201-3**	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
4	**201-4**	GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
5	**202-1**	GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	Rasio upah standar pegawai pemula terhadap upah minimum, berdasarkan gender
6	**202-2**	GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	Proporsi manajemen senior yang direkrut dari komunitas lokal
7	**203-1**	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	Investasi infrastruktur dan dukungan jasa
8	**203-2**	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
9	**204-1**	GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
10	**205-1**	GRI 205: Anti-korupsi 2016	Operasi yang dinilai terhadap risiko korupsi
11	**205-2**	GRI 205: Anti-korupsi 2016	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
12	**205-3**	GRI 205: Anti-korupsi 2016	Insiden korupsi yang terkonfirmasi dan tindakan yang diambil
13	**206-1**	GRI 206: Perilaku Anti-persaingan 2016	Tindakan hukum terkait perilaku anti-persaingan, anti-trust, monopoli
14	**207-1**	GRI 207: Pajak 2019	Pendekatan terhadap pajak
15	**207-2**	GRI 207: Pajak 2019	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak
16	**207-3**	GRI 207: Pajak 2019	keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak
17	**207-4**	GRI 207: Pajak 2019	laporan per negara
18	**301-1**	GRI 301: Material 2016	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
19	**301-2**	GRI 301: Material 2016	Persentase bahan yang digunakan berupa bahan daur ulang
20	**301-3**	GRI 301: Material 2016	Produk dan bahan kemasan yang direklamasi
21	**302-1**	GRI 302: Energi 2016	Konsumsi energi dalam organisasi
22	**302-2**	GRI 302: Energi 2016	Konsumsi energi di luar organisasi
23	**302-3**	GRI 302: Energi 2016	Intensitas energi
24	**302-4**	GRI 302: Energi 2016	Pengurangan konsumsi energi
25	**302-5**	GRI 302: Energi 2016	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa

26	**303-1**	GRI 303: Air dan Efluen 2018	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
27	**303-2**	GRI 303: Air dan Efluen 2018	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
28	**303-3**	GRI 303: Air dan Efluen 2018	Pengambilan air
29	**303-4**	GRI 303: Air dan Efluen 2018	Pembuangan air
30	**303-5**	GRI 303: Air dan Efluen 2018	Konsumsi air
31	**304-1**	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	Lokasi operasional dekat/di dalam area lindung dan keanekaragaman hayati tinggi
32	**304-2**	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	Dampak signifikan aktivitas, produk, jasa terhadap keanekaragaman hayati
33	**304-3**	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
34	**304-4**	GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	Spesies dalam Daftar Merah IUCN dengan habitat terdampak operasi
35	**305-1**	GRI 305: Emisi 2016	Emisi gas rumah kaca langsung (Scope 1)
36	**305-2**	GRI 305: Emisi 2016	Emisi gas rumah kaca energi tidak langsung (Scope 2)
37	**305-3**	GRI 305: Emisi 2016	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya (Scope 3)
38	**305-4**	GRI 305: Emisi 2016	Intensitas emisi gas rumah kaca
39	**305-5**	GRI 305: Emisi 2016	Pengurangan emisi gas rumah kaca
40	**305-6**	GRI 305: Emisi 2016	Emisi bahan perusak ozon (ODS)
41	**305-7**	GRI 305: Emisi 2016	NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya
42	**306-1**	GRI 306: Limbah 2020	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
43	**306-2**	GRI 306: Limbah 2020	Manajemen dampak signifikan terkait limbah
44	**306-3**	GRI 306: Limbah 2020	Limbah yang dihasilkan
45	**306-4**	GRI 306: Limbah 2020	Limbah yang tidak dibuang (dialihkan dari pembuangan)
46	**306-5**	GRI 306: Limbah 2020	Limbah yang diarahkan ke pembuangan
47	**307-1**	GRI 307: Kepatuhan Lingkungan 2016	Nilai moneter denda signifikan atas ketidakpatuhan hukum lingkungan
48	**308-1**	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	Persentase pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria lingkungan
49	**308-2**	GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	Dampak lingkungan negatif signifikan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
50	**401-1**	GRI 401: Kepegawaian 2016	Perekrutan karyawan baru dan tingkat turnover karyawan
51	**401-2**	GRI 401: Kepegawaian 2016	Tunjangan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan pada karyawan sementara/paruh waktu
52	**401-3**	GRI 401: Kepegawaian 2016	Cuti melahirkan/orang tua

53	**402-1**	GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
54	**403-1**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
55	**403-2**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
56	**403-3**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Layanan kesehatan kerja
57	**403-4**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
58	**403-5**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja
59	**403-6**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Promosi kesehatan pekerja
60	**403-7**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Pencegahan dan mitigasi dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait langsung dengan hubungan bisnis
61	**403-8**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Pekerja yang tercakup oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
62	**403-9**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Cedera akibat kerja
63	**403-10**	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Penyakit akibat kerja
64	**404-1**	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
65	**404-2**	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	Program peningkatan keterampilan karyawan dan bantuan transisi
66	**404-3**	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	Persentase karyawan yang menerima tinjauan kinerja secara berkala
67	**405-1**	GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	Keberagaman badan tata kelola dan karyawan
68	**405-2**	GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan 2016	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki
69	**406-1**	GRI 406: Non-diskriminasi 2016	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
70	**407-1**	GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama 2016	Operasi/pemasok dengan risiko terhadap kebebasan berserikat
71	**408-1**	GRI 408: Pekerja Anak 2016	Operasi/pemasok dengan risiko signifikan insiden pekerja anak
72	**409-1**	GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	Operasi/pemasok dengan risiko signifikan insiden kerja paksa
73	**410-1**	GRI 410: Praktik Keamanan 2016	Personel keamanan yang dilatih kebijakan/prosedur hak asasi manusia
74	**411-1**	GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat 2016	Insiden pelanggaran terhadap hak masyarakat adat
75	**412-1**	GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016	Operasi yang ditinjau terkait hak asasi manusia
76	**412-2**	GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan/prosedur hak asasi manusia
77	**412-3**	GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia 2016	Perjanjian investasi yang memuat klausul hak asasi manusia
78	**413-1**	GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	Operasi dengan keterlibatan komunitas lokal, penilaian dampak, program pengembangan

79	**413-2**	GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	Operasi dengan dampak negatif signifikan aktual/potensial pada komunitas lokal
80	**414-1**	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	Persentase pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria sosial
81	**414-2**	GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	Dampak sosial negatif signifikan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
82	**415-1**	GRI 415: Kebijakan Publik 2016	Nilai kontribusi politik
83	**416-1**	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan kategori produk/jasa
84	**416-2**	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	Insiden ketidakpatuhan terkait dampak kesehatan/keselamatan produk dan jasa
85	**417-1**	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	Persyaratan informasi dan pelabelan produk dan jasa
86	**417-2**	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk/jasa
87	**417-3**	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
88	**418-1**	GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	Keluhan yang terbukti terkait pelanggaran privasi pelanggan dan kehilangan data
89	**419-1**	GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi 2016	Nilai moneter denda signifikan atas ketidakpatuhan hukum/regulasi sosial-ekonomi

Lampiran B

NO.	KODE	NAMA
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	AISA	FKS Food Sejahtera Tbk.
3	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
4	BISI	BISI International Tbk.
5	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.
6	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
7	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
8	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
9	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk.
10	DAYA	Duta Intidaya Tbk.
11	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk.
12	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
13	EPMT	Enseval Putera Megatrading Tbk
14	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb
15	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
16	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
17	MYOR	Mayora Indah Tbk.
18	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
19	MGRO	Mahkota Group Tbk.
20	SGRO	Prime Agri Resources Tbk.
21	SKLT	Sekar Laut Tbk.
22	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trad
23	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
24	FAPA	FAP Agri Tbk.
25	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk.
26	TAPG	Triputra Agro Persada Tbk.